

PARTISIPASI KRISTIANI DALAM POLITIK DI INDONESIA¹

Antara Mitos, Realita, dan Politik Yesus

PAULUS S. WIDJAJA*

Abstract

This writing is meant to criticize some myths that the Indonesian Christians and churches have often used to determine Christian participation in politics in Indonesia. Beliefs that politics is an activity done in the public area outside the church toward which Christians can choose whether to get involved, that politics is the most effective means to change society, and that politics aims to strive for the interest of many above group interest, are simply myths. This writing shows that all of us are essentially involved in politics once we live together with other people in the same territory, that the approach through the pillar of culture is more effective than approaches through the pillars of politics or economics in order to change society, and that the essence of politics is to strive for group interest in the public area in a pluralistic society. The movement initiated by Jesus that offers an alternative politics to society by creating a new community living out a new way of life and a new way of relating to others with new values, is a model of an effective approach through the pillar of culture to change society. If we want to implement the politics of Jesus concretely, whether we are politicians working in the world of politics or we are ordinary people, we have to strive for the empowerment of civil society and the enhancement of cultural activities, since those are the things that are effective to change society.

Keywords: national election, politics of Jesus, culture, civil society.

Abstrak

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkritisi berbagai mitos yang sering dijadikan pertimbangan oleh orang-orang Kristen dan gereja dalam

* Dosen Tetap di Fakultas Teologi UKDW.

mengambil keputusan terkait partisipasi kristiani dalam politik di Indonesia. Keyakinan-keyakinan bahwa politik adalah aktifitas yang terjadi di ruang publik di luar gereja, yang terhadapnya orang-orang Kristen bisa memilih untuk terlibat atau tidak; bahwa politik merupakan sarana yang paling efektif untuk mengubah masyarakat, dan bahwa politik bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, melampaui kepentingan kelompok, adalah mitos belaka. Tulisan ini menunjukkan bahwa kita semua pada hakikatnya terlibat dalam politik begitu kita hidup bersama dengan orang lain dalam sebuah wilayah hukum yang sama, bahwa pendekatan melalui kutub budaya jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan melalui kutub politik maupun melalui kutub ekonomi untuk mengubah masyarakat, dan bahwa hakikat dari politik adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelompok di ruang publik dalam sebuah masyarakat majemuk. Gerakan yang diinisiasi oleh Yesus untuk menawarkan politik alternatif pada masyarakat dengan menciptakan komunitas baru yang memberlakukan cara hidup dan cara berelasi yang baru dengan nilai-nilai baru, adalah contoh dari pendekatan melalui kutub budaya yang efektif untuk mengubah masyarakat. Jika politik Yesus ini ingin diwujudkan secara konkret, baik oleh para politikus yang berkiprah di dunia politik praktis maupun oleh orang-orang awam biasa, maka itu berarti kita harus memperjuangkan pemberdayaan masyarakat sipil dan pengembangan kegiatan-kegiatan budaya di masyarakat, karena hal-hal seperti itulah yang justru sangat efektif untuk mengubah masyarakat.

Kata-kata kunci: pemilihan umum, politik Yesus, budaya, masyarakat sipil.

Mitos-Mitos dalam Politik

Pada masa-masa pemilihan umum biasanya banyak warga gereja yang bertanya-tanya bagaimana seharusnya partisipasi kristiani yang tepat. Apakah orang-orang Kristen boleh dan bahkan sebaiknya ikut terlibat aktif, termasuk mencalonkan diri untuk dipilih, atau sekadar terlibat sebagai pemilih saja? Ataupun kita tidak perlu melakukan tindakan apa pun juga, baik menjadi yang dipilih maupun yang memilih, alias golput? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini muncul karena ada kegamangan di dalam diri kita untuk menentukan sikap politis. Kegamangan yang muncul karena kita dihantui oleh berbagai kekhawatiran. Jika kita tidak ikut terlibat dalam pusaran pemilihan ini, apakah aspirasi dan kepentingan orang-orang Kristen bisa didengar dan diperhatikan

oleh masyarakat luas dan para penguasa negeri ini? Sebaliknya, jika kita ikut terlibat, apakah kita memang bisa membawa serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan orang-orang Kristen di Indonesia secara efektif?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tetapi untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang biasanya mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Asumsi-asumsi yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai mitos, yaitu sesuatu yang tidak benar, tetapi dipercayai sebagai kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu mengkritisi mitos-mitos tersebut, dan kemudian melihat bagaimana Yesus, Sang Junjungan kita, menjalankan misi politis-Nya.

1. Politik adalah aktifitas yang terjadi di ruang publik di luar gereja, yang terhadapnya orang-orang Kristen bisa memilih untuk terlibat atau tidak.

Banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, sudah terjatuh dalam lubang neo-platonisme yang dualistis. Dalam paham ini semua realita di dunia dibagi ke dalam dua sisi yang bertentangan satu dengan yang lain. Ada dunia atas dan dunia bawah, ada jiwa dan tubuh, ada bagian suci dan bagian profan, dsb. Semuanya serba berganda dan saling bertentangan. Masing-masing sisi mempunyai normanya sendiri yang berbeda dari norma di sisi yang lain. Dualisme semacam inilah yang telah membuat orang-orang Kristen memisahkan dan membedakan dengan tajam antara dunia politik di luar gereja dan dunia non-politik di dalam gereja. Dunia politik di luar gereja dianggap sebagai dunia yang profan dan kotor, sedangkan dunia non-politik di dalam gereja dipandang sebagai dunia yang suci dan bersih.

Sementara kedua dunia tadi memang bisa dibedakan satu dari yang lain, namun memisahkan kedua dunia tersebut dalam sebuah dualisme yang dikotomis semacam itu secara filosofis dan praktis sangatlah tidak mungkin. Secara sederhana, politik adalah sebuah upaya yang kita lakukan untuk mengatur kehidupan bersama. Itu artinya, di mana pun juga ada lebih dari satu orang yang hidup bersama, maka di situ pula terjadi aktifitas politik sebab mereka harus mengatur bagaimana mereka akan hidup bersama. Dalam pengertian semacam ini, maka aktifitas di dalam gereja pun patut disebut sebagai aktifitas politik. Itu sebabnya di semua gereja bisa ditemukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama sebagaimana tertuang dalam tata gereja, misalnya.

Lebih daripada itu, ilmu politik mengajarkan kepada kita bahwa semua warga yang tinggal bersama di sebuah negara sudah dengan sendirinya terlibat dalam politik, entah dia mengakuinya atau tidak. Kita tidak bisa mengatakan, misalnya, bahwa sebagai orang yang tidak mencalonkan diri dalam pemilu dan tidak ikut terlibat dalam partai politik, maka kita dengan demikian tidak terlibat dalam politik. Berdasarkan definisi ilmiahnya, politik adalah:

Aktifitas dengan mana kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit hukum diselaraskan dengan cara membagikan kekuasaan yang proporsional pada kepentingan-kepentingan tersebut sesuai dengan nilai kepentingan tersebut bagi kesejahteraan dan kelanggengan seluruh komunitas (Crick, 1992: 21).

Ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan dalam definisi ini. *Pertama*, politik adalah sebuah *aktivitas*. Politik bukanlah sebuah kata benda atau sebuah entitas yang dihasilkan dari sebuah aktivitas, tetapi aktivitas itu sendiri dengan segala dinamika di dalamnya. Politik bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, atau sesuatu di dalam mana kita membuat keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat. Ketika kita menjadi warga dari sebuah negara dan hidup bersama dengan para warga negara yang lainnya, maka kita sudah dengan sendirinya terlibat dalam politik. Itu adalah sebuah keniscayaan alamiah yang tidak bisa dihindari. Politik bukanlah merupakan hasil turunan dari sebuah kebaikan umum, tetapi justru merupakan prasyarat bagi terciptanya kebaikan umum tersebut. Bukannya keberadaan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang menghasilkan aktivitas politik (deduktif), tetapi aktivitas politiklah yang menghasilkan Pancasila (induktif). Di mana pun juga di dunia ini, prosesnya selalu demikian.

Kedua, politik adalah sarana dengan mana *kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit hukum diselaraskan*. Politik tercipta secara alamiah ketika ada orang-orang dan kelompok-kelompok orang yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda, baik kepentingan material maupun kepentingan moral, yang tinggal dan hidup bersama dalam sebuah unit hukum yang sama. Di sini persoalan bagaimana unit hukum tersebut terbentuk adalah hal yang tidak penting dan tidak relevan. Bisa jadi unit hukum tersebut terbentuk karena penaklukan atau karena letak geografis. Namun isu yang penting di sini adalah bahwa unit hukum tersebut merupakan kesatuan sosial yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai macam kelompok orang dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di situlah politik muncul sebagai solusi alamiah untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeda

tersebut (Crick, 1992: 18). Jadi selama kita masih mempunyai kepentingan yang berbeda dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat Indonesia, dan kelompok-kelompok yang lain juga memiliki kepentingan yang berbeda dari kita, maka selama itu pula kita membutuhkan dan secara otomatis terlibat dalam politik. Aktivitas politik akan dengan sendirinya berhenti manakala kita tidak lagi memiliki kepentingan yang berbeda dari kelompok-kelompok lain, atau manakala kita tidak lagi tinggal dalam satu wilayah hukum yang sama.

Ketiga, penyalarsan kepentingan yang terjadi dalam aktivitas politik senantiasa dilakukan dengan menggunakan *kesejahteraan dan kelanggengan seluruh komunitas* sebagai tolok ukur utamanya. Di sini tidak berarti bahwa hasil akhir dari penyalarsan kepentingan itu senantiasa bisa memuaskan semua pihak. Tetapi ini berarti bahwa proses penyalarsan kepentingan itu dibutuhkan jika semua kelompok memang ingin hidup bersama. Dan itulah politik. Jadi faktor yang mengikat berbagai kelompok dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit hukum bukanlah kebaikan umum atau konsensus nasional, melainkan kebutuhan untuk hidup bersama itu sendiri (Crick, 1992: 23-24).

Dari pemahaman tersebut kita bisa melihat bahwa pendapat yang memahami politik sebagai sesuatu yang terjadi di ruang publik di luar gereja, yang terhadapnya kita bisa membuat keputusan untuk terlibat atau tidak, adalah sebuah mitos, bukan realita. Kita semua sebagai warga negara sudah dengan sendirinya terlibat dalam politik. Satu-satunya pihak yang bisa berdiri di luar politik hanyalah Tuhan atau Iblis (Crick, 1992: 23).

Hal ini lebih nyata lagi jika kita mengingat bahwa istilah “negara” itu sendiri menunjuk pada “masyarakat yang bertindak sebagai satu kesatuan, dengan kuasa mutlak untuk memaksakan kepatuhan di dalam batas yurisdiksinya” (Wogaman, 1988: 13). Pemahaman ini menyadarkan kita semua bahwa *semua warga negara*, termasuk orang-orang Kristen, sesungguhnya terlibat dalam apa pun juga yang dilakukan oleh negara. Kita bisa jadi adalah orang-orang *pacifism* yang tidak menyukai digunakannya senjata dan kekerasan. Namun ketika kita membeli sesuatu di Indonesia, bahkan membeli buku yang mengulas tentang kejahatan dari penggunaan senjata dan kekerasan sekalipun juga, serta membayar pajak atas buku tersebut, maka kita pada hakikatnya sudah terlibat dalam pembelian senjata yang dilakukan negara dengan menggunakan uang pajak. Artinya, ketika negara melakukan sesuatu, maka kita semua yang menjadi warga negara sudah dengan sendirinya ikut serta melakukan hal tersebut, tidak peduli apakah kita setuju atau tidak dengan tindakan terkait.

2. Politik merupakan sarana yang paling efektif untuk mengubah masyarakat.

Jika mitos pertama menganulir pandangan orang-orang Kristen yang anti-politik, maka mitos kedua memberi peringatan kepada orang-orang Kristen yang terlibat aktif dalam partai politik, dan bahkan mencalonkan diri menjadi penyelenggara negara, baik sebagai anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Orang-orang ini biasanya mempunyai keyakinan bahwa keterlibatan politis semacam itulah yang paling efektif untuk membawa perubahan pada masyarakat, dan dengan demikian orang-orang Kristen dapat ikut serta menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Sikap semacam itu memang tidak salah pada dirinya sendiri. Hal yang perlu dikritisi adalah asumsi yang ada di balik sikap tersebut, sebab ada semacam *optimisme* yang berlebihan akan kemampuan negara, melalui politik, untuk membentuk masyarakat yang lebih baik. Di sini negara dipandang sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan semua persoalan masyarakat. Negara memang dalam kenyataannya merupakan organisasi sosial yang paling universal, paling komprehensif, dan paling berkuasa yang ada di dunia ini. Namun optimisme yang berlebihan pada peran negara membuat kita tidak menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh negara. Perlu diingat bahwa sekalipun negara mempunyai kemampuan besar untuk melakukan hal-hal yang baik, negara tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kebaikan kepada *semua* warganya. Masyarakat dalam sebuah negara adalah entitas yang sangat besar dan kompleks, sehingga negara tidak akan pernah mempunyai kemampuan untuk bisa memberi perhatian pada dan menyelesaikan persoalan semua warganya. Meskipun ada warga masyarakat yang sudah bisa ditolong dari bencana banjir di Jakarta, misalnya, toh dalam kenyataannya tidak semua warga Jakarta bisa ditolong. Apalagi kalau mencakup semua rakyat yang tinggal di wilayah NKRI. Ini adalah keterbatasan kuantitatif yang secara inheren melekat pada negara. Selain itu, meskipun negara mempunyai kuasa mutlak, dalam kenyataannya kekuasaan negara ini sangat terbatas. Negara, misalnya, tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur dan meregulasi nilai-nilai hidup yang dianut oleh masyarakat. Itu sebabnya negara selalu menghadapi kendala besar dan bahkan kelumpuhan jika diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan budaya yang muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain, negara tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan *semua masalah*. Ini adalah keterbatasan kualitatif yang dimiliki oleh negara.²

Di samping itu, dari ilmu sosiologi kita juga belajar bahwa di dalam masyarakat senantiasa terdapat tiga kutub utama yang menopang kehidupannya, yaitu kutub politik, kutub ekonomi, dan kutub budaya.³ Masing-masing kutub mempunyai jenis kekuatannya sendiri-sendiri untuk memengaruhi masyarakat, dan juga mempunyai agen pelaksananya sendiri-sendiri.

Kutub politik adalah kutub di mana penyelenggara negara, yang didukung dan dilindungi oleh kekuatan militer, melakukan karyanya. Penyelenggara negara memang sangat berkuasa karena ketika kita, sebagai individu, bergabung dalam sebuah negara maka kita telah menyerahkan sebagian hak pribadi kita kepada penyelenggara negara demi terjaganya ketertiban umum. Itu sebabnya penyelenggara negara mempunyai kekuasaan besar untuk memengaruhi masyarakat melalui hukum dan *law enforcement*. Artinya, penyelenggara negara memiliki kekuasaan untuk “memaksa” warga negara berperilaku tertentu sebagaimana diatur dalam hukum yang dibuat oleh penyelenggara negara. Jika ada perorangan atau kelompok masyarakat yang mencoba menentangnya, maka penyelenggara negara mempunyai kuasa untuk menahan dan bahkan menghukumnya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang mempunyai keyakinan dan pengharapan besar pada efektivitas pendekatan melalui jalur politik.

Masalahnya, pendekatan melalui jalur politik ini merupakan pendekatan yang mengandalkan kekuatan eksternal. Masyarakat mungkin memang akan berkelakuan baik, namun belum tentu hal itu disebabkan karena mereka memang benar-benar ingin berkelakuan baik. Sama seperti para pengendara sepeda motor yang berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah menyala, bukan karena mereka memang ingin berhenti, tetapi karena mereka takut ditangkap polisi jika mereka tidak berhenti. Jadi pendekatan melalui jalur politik adalah pendekatan yang sebenarnya sangat rapuh landasannya karena tidak dibangun di atas hati nurani dan kesadaran, melainkan di atas paksaan hukum dan ancaman hukuman.

Di samping kutub politik ada juga kutub ekonomi. Kutub ini merupakan kutub di mana para pelaku bisnis melakukan kiprahnya. Dengan kekuatan ekonomi yang mereka miliki, mereka juga bisa mendorong dan memberi stimulus kepada masyarakat untuk berlaku baik. Jika masyarakat berlaku baik, maka mereka akan melakukan investasi bisnis, dan itu berarti kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Sebaliknya jika masyarakat tidak berlaku baik, maka mereka pun enggan menanamkan investasi bisnisnya, atau bahkan mencabut investasi bisnis yang telah mereka tanam. Semua investor senantiasa mencari tempat yang aman untuk berbisnis, tidak sekadar

tenaga kerja murah. Dengan stimulus ekonomi semacam ini maka masyarakat terdorong untuk berubah dan bergerak ke arah yang lebih baik.

Namun sama seperti persoalan dalam pendekatan melalui jalur politik, pendekatan melalui jalur ekonomi juga pada hakikatnya merupakan pendekatan yang bergantung pada kekuatan eksternal. Masyarakat terdorong untuk berlaku baik, bukan karena mereka menyadari kebaikan itu sendiri, melainkan karena mereka mengharapkan ganjaran kesejahteraan ekonomi. Memang hal ini bisa membawa kebaikan, tetapi kebaikan semu, karena tidak lahir dari hati nurani dan kesadaran. Jika stimulus ekonomi memudar atau sirna, maka masyarakat pun akan kembali menunjukkan perilaku mereka yang asli, yang mungkin tidak baik. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi juga merupakan pendekatan yang landasannya rapuh.

Jika pendekatan melalui jalur politik dan pendekatan melalui jalur ekonomi merupakan pendekatan yang bergantung pada kekuatan eksternal, maka pendekatan melalui jalur apa yang dilandaskan pada kekuatan internal? Dalam masyarakat, kutub yang ketiga adalah kutub budaya. Kutub ini merupakan kutub di mana kelompok-kelompok masyarakat sipil melakukan kiprahnya.⁴ Perbedaan utama antara kutub budaya ini dari kutub-kutub politik dan ekonomi terletak pada jenis kekuasaan yang dimilikinya. Jika penyelenggara negara dalam kutub politik mengandalkan kekuatan hukum dan *law enforcement* dengan dukungan kekuatan militer untuk mengubah masyarakat, sedangkan para pelaku bisnis dalam kutub ekonomi mengandalkan kekuatan uang, maka kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam kutub budaya mengandalkan kekuatan nilai-nilai hidup. Kelompok-kelompok masyarakat sipil inilah yang menciptakan, mengelaborasi, memelihara, dan menyebar-luaskan, serta menerus-alihkan, nilai-nilai hidup dalam budaya yang dihidupi dan menghidupi masyarakat.

Karena kiprah kelompok-kelompok masyarakat sipil adalah untuk menyemai nilai-nilai hidup dalam budaya agar terjadi perubahan dalam masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa kelompok-kelompok inilah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Ketika masyarakat berubah maka mereka berubah bukan karena ada ganjaran pahala ataupun karena takut akan hukuman, melainkan karena ada dorongan hati nurani dan kesadaran dari dalam. Perubahan masyarakat terjadi bukan karena kekuatan eksternal, melainkan kekuatan internal.

Semua ini berarti bahwa keterlibatan orang-orang Kristen untuk mengupayakan perubahan masyarakat melalui pendekatan di jalur politik bukanlah satu-satunya strategi perubahan masyarakat, dan jelas bukan

merupakan metode perubahan masyarakat yang efektif. Pendekatan di jalur politik memang bisa membuahkan perubahan pada masyarakat dan membawa masyarakat menjadi lebih baik. Namun pendekatan di jalur politik juga merupakan pendekatan yang rapuh landasannya sebab bergantung pada kekuatan eksternal. Jika kita ingin mengupayakan perubahan masyarakat yang benar-benar efektif, maka strategi yang harus lebih dikembangkan adalah pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Inilah pula yang harus diupayakan oleh orang-orang Kristen yang berkiprah di kutub politik. Bukan terutama untuk menyusun hukum ataupun menegakkan *law enforcement*, melainkan terutama untuk menciptakan ruang seluas-luasnya bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memainkan perannya dalam penyediaan nilai-nilai hidup dalam budaya yang dihidupi dan menghidupi masyarakat.

Jika kita berbicara masalah korupsi, misalnya, maka kita tahu bahwa korupsi tidak akan pernah bisa dihapuskan hanya dengan hukum dan *law enforcement* saja, tidak peduli sebgus apa pun hukum anti-korupsi yang disusun. Korupsi juga tidak bisa dilawan semata-mata dengan perbaikan tingkat ekonomi para penyelenggara negara seperti dengan menaikkan gaji dan tunjangan para penyelenggara negara. Selama nilai-nilai yang dihidupi dan menghidupi masyarakat tidak berubah, maka selama itu pula korupsi akan tetap merajalela. Masalah korupsi bukanlah masalah hukum atau masalah uang, tetapi masalah mentalitas; masalah nilai-nilai hidup.⁵

3. Politik bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak, melampaui kepentingan kelompok.

Mitos terakhir yang perlu kita waspadai dan kritisi adalah mitos tentang netralitas politik. Sebagaimana sudah disampaikan di atas, politik adalah aktivitas alamiah yang lahir karena ada kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda, yang tinggal dalam satu wilayah hukum yang sama. Situasi semacam itu mengharuskan kelompok-kelompok tersebut untuk menyelaraskan kepentingan mereka demi kehidupan bersama itu sendiri. Inilah politik.

Mengingat karakteristik yang demikian, maka politik pada hakikatnya sarat dengan kepentingan kelompok. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Persoalan justru muncul ketika orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik secara naif tidak mengakui adanya kepentingan-kepentingan kelompok ini, dan berpura-pura seolah-olah yang mereka bicarakan dan perjuangkan adalah kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Jargon-jargon yang

sering diungkapkan oleh para politikus di Indonesia bahwa tugas yang mereka emban adalah *amanah rakyat*, atau bahwa mereka akan mengutamakan kepentingan rakyat *di atas* kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok, dan jargon-jargon sejenisnya, justru bisa menjadi jebakan yang sangat berbahaya dalam politik.

Politik senantiasa sarat dengan kepentingan kelompok. Dan, sekali lagi, tidak ada yang salah atau perlu disembunyikan. Justru kepentingan-kepentingan kelompok ini perlu diartikulasikan dengan jelas dan tegas supaya bisa dirundingkan dan diselaraskan bersama dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan berbeda. Semakin dalam para politikus menutup-nutupi dan menyembunyikan kepentingan kelompok mereka, maka semakin dalam pula mereka terjerat dalam kepalsuan politik yang justru akan mencederai masyarakat seluruhnya. Mereka hidup dengan topeng yang menunjukkan seolah-olah mereka memperjuangkan kepentingan orang banyak. Mereka bahkan mengklaim jika suara mereka adalah suara rakyat, padahal sebenarnya yang mereka perjuangkan adalah kepentingan kelompok mereka.

Persoalan ini menjadi lebih serius lagi jika sebagai orang-orang Kristen kita mengingat bahwa akar dari dosa manusia sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab bukanlah keterbatasan insaniah manusia, melainkan ketidak-bersediaan manusia untuk mengakui dan menerima keterbatasan insaniah tersebut. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terbatas. Dan keterbatasan manusia ini bukanlah suatu dosa. Keterbatasan manusia merupakan bagian dari rencana Allah yang indah bagi alam ciptaan-Nya dan harus kita terima dengan penuh hormat serta kerendahan hati (Niebuhr, 1996: 167-169). Pada saat yang sama, manusia juga merupakan makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu sebabnya kita mempunyai kemampuan mentransendensi diri yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Ada “pendaran-pendaran dari yang kekal dan yang mutlak dalam diri alamiah manusia” (Niebuhr dalam Brown [ed.], 1986: 63).

Itu semua berarti bahwa keberadaan diri kita selalu bersifat paradoksikal. Ada kemampuan mentransendensi diri di satu pihak, tetapi juga ada keterbatasan insaniah di lain pihak. Tidak ada yang salah dan berdosa dalam keduanya. Kita justru harus menerima keduanya dengan rasa syukur sebagai anugerah Allah, tanpa menafikkan satu di antaranya. Sama seperti ayah yang anaknya disembuhkan oleh Yesus bisa berseru kepada Yesus, “Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!” (Mrk. 9:24). Ada

kepercayaan, optimisme, di satu pihak. Namun ia tidak membiarkan dirinya jatuh dalam membenaran diri karena optimisme yang berlebihan. Optimisme yang dimilikinya diimbangi dengan ketidakpercayaan, pesimisme, yang alamiah. Tetapi ia juga tidak membiarkan dirinya jatuh dalam fatalisme dan keputus-asaan karena pesimisme yang berlebihan.

Dengan pemahaman semacam ini maka kita harus menolak dengan tegas siapa pun juga yang begitu pesimis dan memandang seolah-olah tidak ada kebaikan sedikit pun juga dalam diri manusia, dan tidak ada kemampuan apa pun juga yang dimiliki manusia untuk mengembangkan diri. Di sini manusia dipandang sebagai makhluk yang benar-benar sudah rusak total oleh dosa. Kita harus tetap yakin bahwa gambar dan rupa Allah dalam diri manusia, meskipun tercederai oleh dosa, namun masih tetap ada dan tetap memungkinkan kita untuk bisa berbuat baik dan mengembangkan diri.

Namun pada saat yang sama kita harus mengkritisi siapa pun juga yang terlalu optimis dan kemudian tidak lagi melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam dirinya. Para politikus yang sangat yakin bahwa mereka bisa memegang amanah rakyat dan berkarya atas nama rakyat, serta mampu mengedepankan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kelompok dan golongan mereka sendiri, adalah para politikus yang *keblinger*. Mereka terlalu optimis dalam memandang diri mereka sendiri, dan lupa bahwa betapapun mereka tetap adalah manusia yang terbatas. Reinhold Niebuhr dengan tepat mengatakan,

Tragedi-tragedi dalam sejarah manusia... tidak disebabkan oleh para kriminal, yang secara tak disengaja disalibkan bersama Kristus; tetapi oleh orang-orang baik yang menyalibkan Dia, oleh para idealis yang tidak memahami campuran aneh dari minat pribadi dan ideal-ideal yang terkandung dalam semua motivasi manusia, oleh para pembaru yang gagal memahami perlunya pembaruan pribadi, oleh para imam yang tidak memahami bahwa “penghakiman dimulai dari dalam rumah Allah,” oleh para nabi yang tidak memahami dunia milik Tuhan dan berbicara “dari imajinasi hati mereka sendiri,” oleh orang-orang bijak yang tidak memahami batas-batas dari hikmat mereka, dan oleh orang-orang benar yang tidak memahami bahwa “dalam pandangan Allah tidak ada manusia yang benar” (Niebuhr dalam Robertson [ed.], 1960: 332).

Singkatnya, politik tidaklah mungkin bisa dipisahkan dari kepentingan diri sendiri dan kelompok sendiri. Justru ketika para politikus berujar bahwa mereka akan membela kepentingan orang banyak dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan kelompok sendiri, maka pada saat itulah mereka

telah bersikap munafik. Sikap semacam itu justru sangat berbahaya dalam politik dan bisa membawa kehancuran bagi seluruh masyarakat. Politik senantiasa sarat dengan kepentingan diri sendiri dan kelompok sendiri. Para politikus perlu mendisiplin diri mereka sendiri karena sering kali mereka melegitimasi kepentingan diri mereka dan kelompok mereka dengan label-label ilahi dan mengungkapkannya seolah-olah itulah kepentingan orang banyak (Niebuhr dalam Robertson [ed.], 1957: 44-45). Memperjuangkan kepentingan kelompok tidaklah serta merta salah pada dirinya sendiri, selama semua kelompok sepakat dan menyadari bahwa mereka perlu hidup bersama di satu wilayah hukum yang sama.

Politik Yesus

Setelah kita melihat mitos-mitos yang selama ini hidup dalam dunia politik, maka tiba saatnya bagi kita untuk melihat alternatif yang ditawarkan oleh Yesus. Namun sebelum itu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa ketika Yesus berkisah di tengah-tengah masyarakat abad pertama Israel, maka sudah ada beberapa corak aktivitas politik yang dijalankan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda (Yoder, 1997: 169-174).

Pertama, kelompok Herodian. Ini adalah kelompok politik yang menjadi pendukung utama Raja Herodes. Mereka berusaha meyakinkan masyarakat Israel bahwa pemerintahan teokratis hanya bisa terwujud melalui pemerintahan Dinasti Raja Herodes. Karena posisi semacam itu maka tidak mengherankan jika kelompok ini juga tidak berkeberatan untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah penjajah Romawi yang berkuasa, karena Raja Herodes merupakan kepanjangan tangan pemerintah penjajah Romawi.

Kedua, kelompok Saduki. Ini adalah kelompok yang mendominasi jabatan imam yang berkuasa di Yerusalem, termasuk jabatan imam besar dan imam-imam kepala. Kelompok Saduki merupakan kelompok para imam terhormat, aristokrat. Mereka berasal dari kelompok kelas menengah ke atas di masyarakat. Secara teologis mereka berbeda dari kelompok Farisi karena mereka hanya mengakui dan menerima hukum-hukum Taurat yang tertulis, dan dengan demikian menolak hukum-hukum keagamaan yang dikembangkan dalam tradisi oral sebagaimana dilakukan oleh kelompok Farisi. Secara teologis mereka juga berbeda dari kelompok Farisi karena mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Karena mereka mendominasi jabatan imam di Yerusalem, maka kelompok ini secara politis

juga menjalin kedekatan dengan pemerintah yang berkuasa demi menjaga keamanan status mereka dan terpenuhinya kepentingan kelompok mereka.

Ketiga, kelompok Farisi. Ini adalah kelompok para ahli agama dari kelas menengah yang hidup di tengah-tengah masyarakat akar rumput bangsa Israel. Karena kedekatan dengan masyarakat akar rumput inilah maka kelompok ini sangat dihormati oleh masyarakat luas. Terkait dengan kehidupan beragama, orang-orang Farisi ini tidak hanya berpegang pada hukum Taurat yang tertulis dan baku, tetapi juga menjunjung tinggi otoritas hukum-hukum keagamaan yang diajarkan dan diwaris-alihkan secara lisan dalam tradisi oral. Dalam hubungan dengan pemerintah yang berkuasa, baik pemerintah penjajah Romawi maupun pemerintah boneka di Israel, mereka bersikap oportunis. Pada prinsipnya mereka sebenarnya tidak menyukai pemerintah yang berkuasa, dan oleh karenanya mereka bersikap sangat kritis terhadap pemerintah serta mengambil jarak darinya. Namun jika kedekatan dengan para penguasa menguntungkan mereka dan bisa menjamin terpenuhinya kepentingan mereka, maka mereka pun tidak segan-segan menjalin hubungan dengan para penguasa, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Yesus.

Keempat, kelompok Zelot. Ini adalah kelompok radikal yang melakukan perlawanan bersenjata untuk menumbangkan kekuasaan kaum penjajah Romawi. Mereka biasanya melakukan serangan gerilya terhadap tentara Romawi. Sebagian pengikut Yesus juga diduga keras merupakan anggota kelompok ini. Mereka memiliki harapan besar pada Yesus karena mereka yakin bahwa perjuangan mereka pasti akan berhasil jika saja Yesus bersedia menggunakan kuasa adikodrati yang dimiliki-Nya untuk menumbangkan penguasa penjajah Romawi.

Kelima, kelompok Esseni. Ini adalah kelompok yang memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat, dan menyendiri di atas gunung guna menjaga kekudusan hidup mereka. Para anggota dari kelompok ini menjalani disiplin keras untuk menjaga pola makan mereka, dan hidup selibat. Bagi mereka, dunia yang dihidupi dalam masyarakat luas adalah dunia yang sudah bobrok dan kotor. Oleh karena itu, mereka memilih untuk memisahkan diri dari dunia tersebut dan hidup menyendiri di atas gunung; tidak terlibat sama sekali dalam hiruk pikuk kehidupan dunia.

Dari semua itu kita bisa melihat bahwa pada saat Yesus berkisah di Israel, ada berbagai corak keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik, yaitu: (1) berkolaborasi secara penuh dengan penguasa, seperti sikap Kelompok Herodian dan Kelompok Saduki; (2) berkolaborasi secara partial

dengan penguasa, tergantung pada apakah kolaborasi itu menguntungkan atau tidak, seperti sikap Kelompok Farisi; (3) melakukan konfrontasi melalui perlawanan bersenjata untuk menumbangkan penguasa yang menindas, seperti sikap Kelompok Zealot; (4) memisahkan diri sepenuhnya dari masyarakat dan hidup menyendiri di atas gunung, seperti sikap Kelompok Esseni. Yang menarik, ketika Yesus berkiprah di tengah masyarakat, Yesus tidak memilih satu pun juga dari alternatif-alternatif yang tersedia. Yesus menciptakan alternatif sendiri.

Hal pertama yang harus kita cermati dalam politik Yesus ini adalah bahwa Yesus tidak pernah berusaha menggulingkan penguasa melalui perlawanan bersenjata sebagaimana dilakukan Kelompok Zealot, betapapun bengisnya penguasa tersebut. Yesus juga tidak pernah mengajak para pengikut-Nya menarik diri dari ruang publik, dan hanya mengurus kehidupan rohani bersama dengan orang-orang sejenis dalam kelompok sendiri yang terpisah dari masyarakat, sebagaimana dilakukan Kelompok Esseni. Namun Yesus tidak pernah menyuruh para pengikut-Nya untuk berkolaborasi dengan pihak penguasa juga, sebagaimana dilakukan Kelompok Herodian dan Kelompok Saduki. Apalagi jika kolaborasi dengan pihak penguasa tersebut dilakukan semata-mata dengan sikap oportunis seperti Kelompok Farisi. Bukan karena Yesus anti-penguasa. Namun Yesus tahu persis bahwa perubahan masyarakat secara esensial tidak akan pernah bisa terjadi semata-mata melalui jalur politik yang mengandalkan hukum dan *law enforcement*.

Yesus memilih untuk mentransformasi masyarakat melalui pendekatan budaya dengan mengubah nilai-nilai hidup, karena inilah memang pendekatan yang paling efektif dan berjangka panjang serta berdampak luas. Fakta bahwa gerakan perubahan masyarakat yang diinisiasi oleh Yesus ternyata berkembang begitu luas di seluruh dunia dan tetap membawa dampak bagi manusia, bahkan setelah lebih dari 2.000 tahun gerakan ini dimulai, adalah sebuah bukti nyata bahwa pendekatan budaya seperti itulah yang paling efektif dalam mengubah masyarakat. Dalam corak aktivitas politis ini, Yesus tidak berusaha menciptakan struktur pemerintahan yang baru, atau menciptakan agama baru, melainkan menciptakan *manusia baru*. Inilah sebabnya mengapa Yesus kemudian disalibkan oleh para penguasa. Bukan karena Ia mengajukan teori baru tentang Allah, atau mempraktikkan ritual baru, atau bahkan menciptakan agama baru. Yesus disalibkan karena Ia menciptakan *manusia baru* dengan cara hidup yang baru. Kenyataan inilah yang dirasa sangat mengancam bagi pihak yang berkuasa, penguasa sekuler maupun penguasa agama.

Gerakan budaya untuk mengubah nilai-nilai hidup seperti itu pulalah yang dilanjutkan oleh murid-murid Yesus. Dalam 2 Korintus 5:17, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah *ciptaan baru*: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.” Menarik untuk memerhatikan bahwa dalam bahasa Yunani yang menjadi bahasa asli Perjanjian Baru, ada dua istilah yang bisa digunakan untuk menunjuk pada “baru,” yaitu *neos* (νέος) dan *kainos* (καίνος). Istilah *neos* digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang baru dalam arti bendanya baru, tetapi kualitasnya tetap sama seperti benda yang lama. Kita bisa mengatakan tentang “pensil baru”, dalam arti pensilnya baru tetapi kualitasnya sama seperti pensil yang lama, tidak ada bedanya. Sedangkan istilah *kainos* digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang baru dalam arti kualitas dari benda tersebut baru. Kita bisa menyebut mobil bertenaga surya, misalnya, sebagai sebuah jenis mobil baru dalam arti *kainos*. Di sini yang ditekankan adalah bahwa kualitas mobilnya benar-benar baru; sama sekali berbeda dari mobil lama yang menggunakan bahan bakar minyak. Kebaruan semacam inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus sebagai dampak dari peristiwa Kristus. Kita benar-benar menjadi *ciptaan baru*. Artinya, kita menjadi manusia dengan kualitas yang baru. Manusia yang memiliki cara hidup dan cara berelasi yang baru dengan orang-orang lain, tidak seperti dahulu. Inilah yang seharusnya menjadi visi utama dari aktivitas politik para pengikut Kristus.

Namun untuk mewujudkan visi politik semacam itu, kita harus bertanya pada diri kita sendiri terlebih dahulu, apakah Yesus memang benar-benar menjadi Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak. Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan apakah misi politis yang diinisiasi oleh Yesus, politik Yesus, akan kita jalankan secara konsisten dan konsekuen atau tidak. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengatakan, “Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: ‘*Yesus Kristus adalah Tuhan*,’ bagi kemuliaan Allah, Bapa!” (Fil. 2:9-11). Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, merupakan pengakuan iman Kristen yang paling tua. Sebelum umat Kristen memiliki Pengakuan Iman Rasuli, atau Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel, atau Pengakuan Iman Athanasius, dsb., maka pengakuan iman yang dimiliki oleh umat Kristen hanyalah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.

Pengakuan iman ini tidak hanya berkaitan dengan pengakuan tentang hakikat ontologis Kristus. Yang lebih penting lagi adalah bahwa pengakuan

iman ini berkaitan dengan pengakuan tentang kekuasaan Kristus atas segenap alam semesta ini. Sebuah pengakuan tentang kosmos itu sendiri, bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta dan segenap isinya. Ada dua dampak langsung dari pengakuan iman ini. Yang *pertama*, pengakuan iman ini menafikkan segala bentuk dualisme dikotomis yang mengasumsikan seolah-olah ada satu wilayah di dunia ini, entah itu disebut sebagai “dunia” atau “ruang publik” atau “politik” atau apa pun juga yang ada di luar gereja, yang tidak berada di bawah kuasa Kristus. Kristus adalah Tuhan atas semua wilayah yang ada di dunia ini, di dalam maupun di luar gereja, privat maupun publik, spiritual maupun material. Oleh karena itu, kita tidak bisa menarik diri secara *a-priori* dari politik, seolah-olah kekristenan hanya kena-mengena dengan dunia lain, bukan dunia yang berdosa sekarang ini (Yoder, 1984: 11-12). Yang *kedua*, pengakuan iman ini juga menegaskan bahwa justru karena Kristus sudah berkuasa, maka kita tidak perlu memiliki ambisi untuk berkuasa. Yesus tidak pernah sekali pun mendorong murid-murid-Nya dan para pengikut-Nya untuk mencari kuasa dalam rangka memengaruhi perpolitikan nasional, bahkan untuk maksud dan tujuan yang mulia sekalipun juga. Pusat perhatian kita seharusnya bukanlah tentang bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kuasa untuk memimpin dan mengendalikan dunia, melainkan bagaimana supaya kita bisa memuliakan Kristus yang adalah Tuhan.

Oleh karena itu kita perlu kritis terhadap orang-orang Kristen yang mempunyai keyakinan terlalu kuat bahwa peran politis yang paling penting dari orang-orang Kristen di ranah publik adalah mengupayakan “rekayasa sosial” (Yoder, 1997: 104-105, 184).⁶ Orang-orang Kristen ini memahami peran politis umat Kristen di ranah publik terpusat pada persoalan-persoalan keputusan institusional dan struktur sosial, dan kemudian mereka mengabaikan dimensi-dimensi interpersonal dari hubungan antar manusia.

Dilandasi oleh pemahaman yang keliru seperti itu, orang-orang Kristen ini berkeyakinan bahwa panggilan publik yang paling terhormat bagi orang-orang Kristen adalah untuk menanamkan pengaruh politik atas masyarakat, dan bahwa opini publik merupakan senjata yang paling ampuh. Sejalan dengan itu, aktivitas politik umat Kristen dalam masyarakat luas kemudian juga terpusat pada persoalan bagaimana “orang-orang baik”, yaitu orang-orang Kristen, bisa mendapatkan kuasa untuk memimpin dan mengendalikan masyarakat. Orang-orang Kristen yang memegang posisi kekuasaan dalam masyarakat, apalagi ikut terlibat sebagai penyelenggara negara, kemudian dipandang sebagai agen-agen perubahan masyarakat yang paling utama (Yoder, 1984: 154).⁷

Persoalan ini diperparah oleh kenyataan bahwa metafora Alkitabiah yang sering kali digunakan oleh orang-orang Kristen dalam aktivitas politiknya di ruang publik adalah metafora “garam dunia”. Berbekal metafora ini maka banyak orang Kristen yang meyakini bahwa tugas utama orang-orang Kristen dalam kesaksian publiknya adalah untuk menggarami dunia. Inilah alasan yang digunakan untuk melegitimasi keterlibatan orang-orang Kristen dalam aktivitas politik di ruang publik.

Metafora itu sendiri tidak ada salahnya sebab Yesus memang dengan tegas mengatakan kepada murid-murid-Nya, “Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang” (Mat. 5:13). Kita memang diminta untuk memainkan peran sebagai garam yang menggarami dunia. Namun kita sering kali lupa bahwa metafora ini tidak pernah berdiri sendiri. Kata-kata Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus melanjutkan wejangan-Nya dengan mengatakan, “Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga” (Mat. 5:14-16). Peran yang harus kita jalankan *bersamaan* dengan peran sebagai garam adalah peran sebagai terang yang bukan saja menerangi orang-orang di sekitar kita, tetapi juga dilihat oleh mereka. Dengan kata lain, kita diminta oleh Yesus untuk menjadi teladan; menjadi kota di atas gunung yang tidak tersembunyi. Inilah peran yang sering kali dilupakan oleh orang-orang Kristen yang terlibat dalam aktivitas politik di ruang publik.

Jadi Bagaimana?

Setelah kita melihat semua ini, maka bagaimana sekarang? Apakah kita tidak perlu terlibat dalam aktivitas politik di ruang publik? Sama sekali tidak demikian. Orang-orang Kristen tetap perlu terlibat dalam aktivitas politik di ruang publik. Namun keterlibatan kita dalam aktivitas politik di ruang publik harus memerhatikan catatan-catatan sebagaimana sudah disampaikan di atas.

Yang *pertama*, kita harus menepis jauh-jauh mitos-mitos dalam politik yang selama ini mungkin kita yakini kebenarannya. Kita tidak boleh

beranggapan bahwa politik adalah sebuah ranah yang kotor di luar gereja dan harus kita jauhi. Di mana pun juga kita berada, kita sudah dengan sendirinya terlibat dalam politik. Kita tidak bisa memutuskan untuk mau terlibat atau tidak.

Namun kita juga tidak boleh beranggapan bahwa politik adalah sarana yang paling efektif untuk mengubah masyarakat. Politik memang penting karena dibutuhkan untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dalam satu wilayah hukum yang sama, tetapi bukan sarana yang paling efektif untuk mengubah masyarakat. Ada banyak keterbatasan di dalamnya. Selanjutnya kita juga tidak boleh beranggapan bahwa politik adalah sebuah aktivitas melalui mana orang-orang yang terlibat di dalamnya memperjuangkan kepentingan bersama, melampaui kepentingan pribadi dan kelompok. Politik senantiasa sarat dengan kepentingan kelompok. Kita justru harus berani terbuka dan jujur mengartikulasikan kepentingan pribadi dan kelompok ini, bukannya menggunakan topeng untuk menutup-nutupinya. Semakin posisi masing-masing kelompok jelas, maka semakin mudah pula menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sebaliknya, semakin kepentingan-kepentingan kelompok ditutup-tutupi dengan kedok kepentingan rakyat banyak, maka semakin susah pulalah mencapai penyelarasan kepentingan yang otentik. Terlalu banyak kemunafikan di dalamnya. Bahkan kepentingan kelompok bisa dengan begitu saja diberi label ilahi dan dianggap sama dengan kepentingan orang banyak.

Yang *kedua*, kalau pun toh kita ingin terlibat dalam aktivitas politik di ruang publik, maka kita perlu jelas bahwa tujuan utama keterlibatan kita bukanlah untuk merekayasa masyarakat melalui sarana politik atau ekonomi agar terjadi perubahan yang membawa masyarakat menjadi lebih baik, melainkan untuk menciptakan manusia baru dengan cara hidup baru. Tujuan ini hanya akan bisa kita capai secara efektif apabila kita memusatkan perhatian bukan pada pendekatan politik atau ekonomi, melainkan pendekatan budaya untuk menyemai nilai-nilai hidup. Secara konkrit, ini berarti kita harus berjuang untuk memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan mempromosikan kegiatan-kegiatan budaya, karena hal-hal seperti inilah yang justru akan sangat efektif untuk mengubah masyarakat. Korupsi tidak akan pernah bisa diberantas semata-mata dengan membuat undang-undang anti-korupsi yang lebih baik, melaksanakan *law enforcement* yang lebih tegas, ataupun dengan memberi insentif ekonomi yang lebih besar. Korupsi hanya bisa diberantas jika memang ada perubahan nilai hidup. Demikian pula halnya dengan masalah perusakan lingkungan, banjir, sampah, persaingan bisnis di dunia global, etos kerja, konflik sektarian dan primordialisme, dsb. Semua

persoalan ini hanya bisa diubah secara efektif melalui pendekatan budaya, bukan pendekatan politik atau ekonomi semata. Mungkin benar bahwa pendekatan budaya bisa jadi tidak efisien. Membutuhkan waktu lama dan kesabaran luar biasa. Tetapi itulah pendekatan yang paling efektif.

Yang *terakhir*, keterlibatan kita dalam aktivitas politik di ruang publik harus dilandaskan pada pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu artinya, di mana pun juga kita berada dan berkarya, tujuan dari darma bakti kita adalah untuk memuliakan Kristus yang adalah Tuhan. Ambisi kita untuk berkuasa harus ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Kita tidak perlu berambisi untuk berkuasa, justru karena Kristus telah berkuasa. Dan itu berarti bahwa di mana pun juga kita berada, kita seharusnya bisa menjadi kota di atas gunung; menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dan masyarakat yang kita layani. Baru dengan demikian maka Kristus akan benar-benar dimuliakan. *Ad maiorem dei gloriam*. Untuk sebesar-besarnya kemuliaan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Crick, Bernard. 1992. *In Defense of Politics*. Edisi keempat. Chicago: University of Chicago Press.
- Eberly, Don. 1994. *Restoring the Good Society: A New Vision for Politics and Culture*. Cetakan kedua. Grand Rapids: Hourglass Books.
- Niebuhr, Reinhold. 1957. "When Will Christians Stop Fooling Themselves?". Dalam D.B. Robertson (ed.). *Love and Justice: Selections from the Shorter Writings of Reinhold Niebuhr*. Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press.
- _____. 1960. "Our Dependence Is On God". Dalam D.B. Robertson (ed.). *Essays in Applied Christianity*. Cetakan kedua. New York: Living Age Books, Meridian Books.
- _____. 1986. *The Essential Reinhold Niebuhr*. Robert McAfee Brown (ed.). New Haven and London: Yale University Press.
- _____. 1996. *The Nature and Destiny of Man*. Volume I: Human Nature. Library of Theological Ethics, Reprint edition. Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press.
- Perlas, Nicanor. 2003. *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*. New Society Publishers.

- Widjaja, Paulus S. 2004. "Membangun Teologi Politik di Indonesia: Dari Teologi Sukses ke Politik Pelayanan dan Doksologi". *Jurnal Gema Teologi*. Januari 2004: 49-63.
- _____. 2012. "Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal". Dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (ed.). *Malunya Jadi Orang Indonesia*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- Wogaman, J. Philip. 1988. *Christian Perspectives on Politics*. Philadelphia: Fortress Press.
- Yoder, John Howard. 1997. *For The Nations: Essays Public & Evangelical*. Grand Rapids, Michigan and Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company.
- _____. 1984. *Priestly Kingdom*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Catatan Akhir

¹ Makalah disampaikan dalam acara Pendampingan dan Pengutusan Calon Legislatif Warga Gereja Kristen Jawa se-Sinode Gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah Tahap II di Wisma Kasih Kantor Sinode Gereja Kristen Jawa, Salatiga, pada tanggal 12 Februari 2014.

² Lihat uraian tentang persoalan keterbatasan negara ini dalam Don Eberly (1994).

³ Uraian lengkap tentang ketiga kutub ini dapat dilihat di Nicanor Perlas (2003), khususnya Bab 1.

⁴ Istilah "masyarakat sipil" di sini dipahami secara sederhana sebagai kelompok-kelompok masyarakat non-pemerintah yang terbentuk oleh keinginan masyarakat itu sendiri dan dikelola oleh masyarakat secara independen. Termasuk dalam golongan masyarakat sipil adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas-komunitas agama seperti gereja, dan bahkan keluarga-keluarga.

⁵ Untuk pembahasan masalah ini lihat Paulus S. Widjaja (dalam Natar dan Setio [ed.], 2012: 18-35).

⁶ Yoder juga mengingatkan bahwa Yesus dan agama Kristen tidak bisa dilepaskan dari etos Yahudi. Dan pengakuan iman orang-orang Yahudi tentang kemahakuasaan Allah senantiasa dijadikan dasar oleh umat Yahudi untuk tidak berusaha meraih kekuasaan politik di bumi agar supaya kehendak Allah dapat terjadi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa pembentukan tatanan sosial adalah tugas utama sang Mesias, dan oleh karenanya harus tetap dibiarkan ada di tangan sang Mesias. Mengambil alih tugas ini dari sang Mesias adalah sebuah penghujatan yang tak terampunkan. Di samping itu, kegagalan pemberontakan bersenjata dari kelompok Makabe, Zelot, dan Bar Kokhba untuk merestorasi kerajaan nasional cukup untuk memberi pelajaran bahwa upaya semacam itu tidak direstui Allah (Yoder, 1997: 67-68).

⁷ Untuk kritik terhadap pemahaman semacam ini lihat Paulus S. Widjaja (2004: 49-63).